



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2094 K/80/MEM/2005**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN
DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2006**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2006 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2381);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 428);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4571);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
11. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 118.04/695/BAKD tanggal 10 November 2005 Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Konsultasi antara Departemen Dalam Negeri dengan Departemen Teknis;
 2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 118/1965/OTDA tanggal 23 Desember 2005 perihal Penyampaian Berita Acara Sidang DPOD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2006.

KESATU : Daerah Penghasil berikut dasar penghitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi adalah *lifting* (prakiraan produksi dikurangi prakiraan pemakaian sendiri) minyak bumi dan gas bumi dari kegiatan PT Pertamina (Persero) sendiri, kegiatan Kontrak *Production Sharing* dan/atau kegiatan kontrak kerja sama lainnya di daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daerah penghasil berikut dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum dari Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah :

- a. prakiraan penerimaan dari luran Tetap/Landrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);

b. prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty yang dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual, ¶

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2005



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

[Signature]
LULUK SUMIARSO

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
8. Para Gubernur yang bersangkutan
9. Para Bupati/Walikota yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2094 K/80/MEM/2005
 TANGGAL : 28 Desember 2005

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
 MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (LIFTING) UNTUK TAHUN 2006

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel)	Lifting Gas Bumi (Ribuan MMBTU)
A.	WILAYAH LAUT < 4 MIL	316.894,53	1.807.677,91
I.	<u>Nanggroe Aceh Darussalam</u>	<u>4.636,87</u>	<u>112.046,00</u>
1.	Kab. Aceh Timur	30,00	4.406,00
2.	Kab. Aceh Utara	3.452,00	107.640,00
3.	Kab. Aceh Tamiang	1.154,87	-
II.	<u>Sumatera Utara</u>	<u>527,64</u>	<u>30.661,60</u>
1.	Kab. Langkat	512,40	24.042,90
2.	Kab. Binjai	12,00	1.540,88
3.	Kab. Deli Serdang	3,24	5.077,82
III.	<u>Riau</u>	<u>162.486,52</u>	<u>5.261,00</u>
1.	Kab. Bengkalis	69.971,36	-
2.	Kab. Indragiri Hulu	760,49	-
3.	Kab. Kampar	17.634,47	-
4.	Kab. Rokan Hulu	659,67	-
5.	Kab. Rokan Hilir	34.998,84	-
6.	Kab. Siak	37.932,43	-
7.	Kab. Pelalawan	529,26	-
8.	Kota Pekanbaru	-	5.261,00
IV.	<u>Kepulauan Riau</u>	<u>32.060,00</u>	<u>139.286,00</u>
1.	Kab. Natuna	32.060,00	139.286,00
V.	<u>Jambi</u>	<u>13.211,51</u>	<u>75.855,80</u>
1.	Kab. Batanghari	1.289,34	8.371,00
2.	Kab. Muaro Jambi	1.482,24	-
3.	Kota Jambi	692,43	-
4.	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.542,21	22.269,98
5.	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.243,79	45.214,82
6.	Kab. Sarolangun	1.049,00	-
7.	Kab. Tebo	912,50	-
VI.	<u>Sumatera Selatan</u>	<u>29.348,57</u>	<u>353.741,63</u>
1.	Kab. Lahat	877,88	6.695,30
2.	Kab. Muara Enim	4.528,99	90.971,46
3.	Kota Prabumulih	2.354,17	7.720,68
4.	Kab. Musi Banyuasin	15.689,62	180.222,88
5.	Kab. Banyuasin	1.278,10	-
6.	Kab. Musi Rawas	2.787,82	60.953,08
7.	Kab. Ogan Ilir	360,00	-
8.	Kab. Ogan Komering Ulu	1.471,99	7.178,23
VII.	<u>Lampung</u>	<u>2.897,00</u>	-
1.	Kab. Lampung Timur	2.897,00	-
VIII.	<u>DKI Jakarta</u>	<u>4.117,99</u>	<u>6.384,00</u>
IX.	<u>Jawa Barat</u>	<u>7.176,03</u>	<u>203.217,26</u>
1.	Kab. Indramayu	2.179,83	29.094,90
2.	Kab. Karawang	1.072,99	80.336,79
3.	Kab. Majalengka	226,40	1.193,94
4.	Kab. Subang	500,32	88.175,12
5.	Kab. Bekasi	3.196,49	4.416,51

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel)	Lifting Gas Bumi (Ribu MMBTU)
X.	<u>Jawa Tengah</u>	<u>315,66</u>	<u>-</u>
1.	Kab. Blora	314,56	-
2.	Kab. Grobogan	1,10	-
XI.	<u>Jawa Timur</u>	<u>10.696,98</u>	<u>54.311,00</u>
1.	Kab. Bojonegoro	5.473,84	-
2.	Kab. Bangkalan	212,06	-
3.	Kab. Sumenep	2.392,00	37.803,00
4.	Kab. Tuban	2.022,68	-
5.	Kab. Lamongan	231,40	-
6.	Kab. Sidoarjo	365,00	16.336,00
7.	Kab. Mojokerto	-	172,00
XII.	<u>Kalimantan Selatan</u>	<u>2.263,00</u>	<u>-</u>
1.	Kab. Tabalong	2.263,00	-
XIII.	<u>Kalimantan Timur</u>	<u>36.201,82</u>	<u>816.884,74</u>
1.	Kab. Bulungan	802,93	2.007,50
2.	Kab. Nunukan	2.007,50	-
3.	Kota Tarakan	509,69	5.867,40
4.	Kota Samarinda	236,74	4.830,00
5.	Kab. Kutai Kertanegara	29.276,89	792.900,34
6.	Kab. Kutai Timur	1.337,07	-
7.	Kab. Panajam Paser Utara	1.449,00	1.531,00
8.	Kota Bontang	582,00	9.748,50
XIV.	<u>Sulawesi Tengah</u>	<u>1.100,00</u>	<u>-</u>
1.	Kab. Morowali	1.100,00	-
XIV.	<u>Sulawesi Selatan</u>	<u>-</u>	<u>9.394,51</u>
1.	Kab. Wajo	-	9.394,51
XV.	<u>Maluku</u>	<u>2.800,00</u>	<u>-</u>
1.	Kab. Seram Bagian Timur	2.800,00	-
XVI.	<u>Irian Jaya Barat</u>	<u>7.054,94</u>	<u>634,37</u>
1.	Kab. Teluk Bintuni	41,99	-
2.	Kab. Sorong	4.693,95	634,37
3.	Kab. Raja Ampat	2.319,00	-
B.	WILAYAH LAUT 4 - 12 MIL	34.055,58	444.005,10
I.	Lampung	8.021,98	-
II.	Bangka Belitung	1.173,71	-
III.	Jawa Barat	4.586,43	75.739,00
IV.	Kalimantan Timur	19.105,46	319.721,10
V.	Kepulauan Riau	1.168,00	48.545,00
C.	WILAYAH LAUT > 12 MIL	32.299,94	185.446,82
JUMLAH (A+B+C)		383.250,05	2.437.129,83



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

LULUK SUMIARSO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2094 K/80/MEM/2005
 TANGGAL : 28 Desember 2005

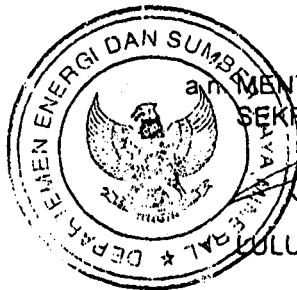
DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
 SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2006

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		Jumlah (Rp)
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	
I Nanggroe Aceh Darussalam			40.500.000	59.526.218	100.026.218
1	Kab. Aceh Besar	KP, KK	40.500.000	6.345.150	46.845.150
2	Kab. Pidie	KK	-	19.750.500	19.750.500
3	Kab. Aceh Barat	KK	-	16.580.768	16.580.768
4	Kab. Aceh Jaya	KK	-	15.919.200	15.919.200
5	Kab. Aceh Singkil	KK	-	930.600	930.600
ii Sumatera Utara			-	948.748.150	948.748.150
1	Kab. Tapanuli Selatan	KK	-	272.472.750	272.472.750
2	Kab. Mandailing Natal	KK	-	287.644.500	287.644.500
3	Kab. Tapanuli Tengah	KK	-	130.135.500	130.135.500
4	Kab. Humbang Hasundutan	KP	-	15.762.250	15.762.250
5	Kab. Dairi	KK	-	129.977.100	129.977.100
6	Kab. Tapanuli Utara	KK	-	58.806.000	58.806.000
7	Kota Padang Sidempuan	KK	-	49.128.750	49.128.750
8	Kab. Pakpak Barat	KK	-	4.821.300	4.821.300
III Sumatera Barat			4.456.000.000	543.141.465	4.999.141.465
1	Kota Sawahlunto	KP, PKP2B	4.276.000.000	389.497.990	4.665.497.990
2	Kab. Sawahlunto Sijunjung	KP, PKP2B	180.000.000	101.885.325	281.885.325
3	Kab. Pesisir Selatan	KP	-	43.312.500	43.312.500
4	Kab. Limapuluh Kota	KP	-	6.450.000	6.450.000
5	Kab. Solok	KP, PKP2B	-	1.995.650	1.995.650
IV Riau			6.189.050.000	1.333.192.700	7.522.242.700
1	Kab. Kuantan Sengingi	KP, PKP2B	2.135.000.000	466.474.600	2.601.474.600
2	Kab. Indragiri Hulu	KP, PKP2B	4.054.050.000	414.126.150	4.468.176.150
3	Kab. Pelalawan	KP	-	401.845.950	401.845.950
4	Kab. Indragiri Hilir	PKP2B	-	17.721.000	17.721.000
5	Kab. Siak	KP	-	25.025.000	25.025.000
6	Kab. Rokan Hulu	KP	-	8.000.000	8.000.000
V Kepulauan Riau			31.695.800.000	1.025.398.200	32.721.198.200
1	Kab. Karimun	KP, KK	20.910.800.000	559.603.950	21.470.403.950
2	Kab. Kepulauan Riau	KP	6.210.000.000	197.892.500	6.407.892.500
3	Kab. Lingga	KP	3.050.000.000	228.578.000	3.278.578.000
4	Pem. Prrov. Kep. Riau	KP	1.525.000.000	39.323.750	1.564.323.750
VI Jambi			-	664.180.282	664.180.282
1	Kab. Merangin	KP	-	240.960.000	240.960.000
2	Kab. Batanghari	KP	-	48.825.582	48.825.582
3	Kab. Bungo	KP	-	199.120.950	199.120.950
4	Kab. Sarolangun	PKP2B	-	113.973.750	113.973.750
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	KP	-	23.300.000	23.300.000
6	Kab. Tebo	KP	-	38.000.000	38.000.000
VII Sumatera Selatan			104.037.000.000	1.874.241.644	105.911.241.644
1	Kab. Muara Enim	KP, PKP2B	85.566.600.000	406.263.620	85.972.863.620
2	Kab. Lahat	KP, PKP2B	18.470.400.000	331.652.650	18.802.052.650
3	Kab. Musi Banyuasin	KP, PKP2B	-	435.583.919	435.583.919
4	Kab. Ogan Komering Ulu	PKP2B	-	308.979.000	308.979.000
5	Kab. Musi Rawas	KP, KK, PKP2B	-	127.596.300	127.596.300
6	Kab. Banyuasin	PKP2B	-	199.776.555	199.776.555
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	PKP2B	-	64.389.600	64.389.600
VIII Bengkulu			2.801.400.000	212.875.500	3.014.275.500
1	Kab. Bengkulu Utara	KP	1.938.900.000	137.058.750	2.075.958.750
2	Kab. Seluma	KP	862.500.000	65.851.750	928.351.750
3	Kab. Lebong	KP	-	9.965.000	9.965.000

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
VIX	<u>Kep. Bangka Belitung</u>		116.959.000.000	14.853.135.250	131.812.135.250
1	Kab. Bangka Selatan	KP, KK	35.629.542.503	2.511.178.500	38.140.721.003
2	Kab. Bangka Induk	KP	25.810.218.978	3.522.325.000	29.332.543.978
3	Kab. Bangka Tengah	KP, KK	34.779.196.809	1.873.765.500	36.652.962.309
4	Kab. Bangka Barat	KP	15.440.041.710	2.178.712.500	17.618.754.210
5	Kab. Belitung Timur	KP	3.180.000.000	3.343.378.750	6.523.378.750
6	Kab. Belitung Induk	KP	2.120.000.000	1.303.825.000	3.423.825.000
7	Kota Pangkal Pinang	KP	-	119.950.000	119.950.000
X	<u>Lampung</u>		19.687.500	431.459.370	451.146.870
1	Kab. Tanggamus	KP, KK	4.687.500	369.452.870	374.140.370
2	Kab. Lampung Selatan	KP	15.000.000	18.347.500	33.347.500
3	Kab. Lampung Barat	KK	-	43.362.000	43.362.000
4	Kab. Way Kanan	PKP2B	-	297.000	297.000
XI	<u>Jawa Barat</u>		19.335.405.408	476.287.700	19.811.693.108
1	Kab. Bogor	KP	19.326.405.408	181.610.750	19.508.016.158
2	Kab. Garut	-	-	127.465.200	127.465.200
3	Kab. Cianjur	KP	-	56.460.000	56.460.000
4	Kab. Sukabumi	KP	7.650.000	55.772.500	63.422.500
5	Kab. Purwakarta	KP	1.350.000	2.450.000	3.800.000
6	Kab. Bandung	KP	-	43.095.000	43.095.000
7	Kab. Tasikmalaya	KP	-	9.434.250	9.434.250
XII	<u>Banten</u>		589.370.538	26.456.000	615.826.538
1	Kab. Lebak	KP	589.370.538	19.273.500	608.644.038
2	Kab. Pandeglang	KP	-	7.182.500	7.182.500
XIII	<u>Jawa Tengah</u>		241.500.000	53.071.600	294.571.600
1	Kab. Purworejo	KP	69.000.000	9.827.500	78.827.500
2	Kab. Cilacap	KP	172.500.000	43.244.100	215.744.100
XIV	<u>Daerah Istimewa Yogyakarta</u>		-	11.710.000	11.710.000
1	Kab. Kulonprogo	KP	-	11.710.000	11.710.000
XV	<u>Jawa Timur</u>		336.179.200	189.041.150	525.220.350
1	Kab. Jombang	KP	243.600.000	25.501.750	269.101.750
2	Kab. Pasuruan	KP	42.004.200	36.619.000	78.623.200
3	Kab. Banyuwangi	KP	35.700.000	668.000	36.368.000
4	Kab. Trenggalek	KP	14.875.000	23.218.500	38.093.500
5	Kab. Lumajang	KP	-	12.610.000	12.610.000
6	Kab. Jember	KP	-	90.423.900	90.423.900
XVI	<u>Kalimantan Barat</u>		-	1.429.984.950	1.429.984.950
1	Kab. Sanggau	KP	-	591.150.000	591.150.000
2	Kab. Ketapang	KK	-	568.287.450	568.287.450
3	Kab. Sintang	KP, KK, PKP2B	-	156.347.500	156.347.500
4	Kab. Kapuas Hulu	KP, KK	-	64.000.000	64.000.000
5	Kab. Bengkayang	KP	-	16.620.000	16.620.000
6	Kab. Melawi	KP	-	12.500.000	12.500.000
7	Kab. Sambas	KP, KK	-	11.080.000	11.080.000
8	Kab. Sekadau	KP	-	10.000.000	10.000.000
XVII	<u>Kalimantan Tengah</u>		13.860.000.000	3.394.019.959	17.254.019.959
1	Kab. Murung Raya	KK, PKP2B	13.860.000.000	1.677.703.579	15.537.703.579
2	Kab. Barito Utara	PKP2B	-	707.434.900	707.434.900
3	Kab. Gunung Mas	KK	-	346.965.450	346.965.450
4	Kab. Kapuas	KP, KK, PKP2B	-	260.114.800	260.114.800
5	Kab. Barito Selatan	KP, PKP2B	-	209.153.880	209.153.880
6	Kab. Katingan	KK	-	92.466.000	92.466.000
7	Kab. Barito Timur	KP	-	45.378.100	45.378.100
8	Kab. Seruyan	KK	-	30.343.500	30.343.500
9	Kab. Kotawaringin Barat	KK	-	14.429.250	14.429.250
10	Kab. Kotawaringin Timur	KP, KK	-	10.030.500	10.030.500

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XVIII	<u>Kalimantan Selatan</u>		<u>535.793.850.000</u>	<u>5.895.699.824</u>	<u>541.689.549.824</u>
1	Kab. Kotabaru	KP, KK, PKP2B	113.727.861.300	2.158.783.340	115.886.644.640
2	Kab. Tanahlaut	KP, KK, PKP2B	88.797.861.300	698.337.430	89.496.198.730
3	Kab. Tanah Bumbu	KP, PKP2B	116.443.277.400	822.818.338	117.266.095.738
4	Kab. Balangan	PKP2B	80.437.500.000	578.876.166	81.016.376.166
5	Kab. Tabalong	PKP2B	68.062.500.000	584.174.250	68.646.674.250
6	Kab. Banjar	KP, KK, PKP2B	35.706.825.000	542.245.800	36.249.070.800
7	Kab. Tapin	KP, KK, PKP2B	17.203.725.000	257.102.700	17.460.827.700
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	KK, PKP2B	9.355.500.000	63.290.700	9.418.790.700
9	Kota Banjarbaru	KK, PKP2B	6.058.800.000	170.923.500	6.229.723.500
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	KP, PKP2B	-	19.147.600	19.147.600
XIX	<u>Kalimantan Timur</u>		<u>1.231.404.871.500</u>	<u>11.135.130.968</u>	<u>1.242.540.002.468</u>
1	Kab. Kutai Timur	KP, PKP2B	701.163.900.000	3.636.128.590	704.800.028.590
2	Kab. Pasir	KP, KK, PKP2B	155.182.500.000	1.799.443.575	156.981.943.575
3	Kab. Kutai Kertanegara	KP, PKP2B	122.039.100.000	2.579.618.030	124.618.718.030
4	Kab. Berau	KP, PKP2B	84.645.000.000	1.237.660.900	85.882.660.900
5	Kab. Kutai Barat	KK, PKP2B	113.610.271.500	979.738.353	114.590.009.853
6	Kota Samarinda	KP, PKP2B	35.623.800.000	221.963.840	35.845.763.840
7	Kab. Nunukan	KK, PKP2B	19.057.500.000	260.023.500	19.317.523.500
8	Kab. Sulungan	KP, KK, PKP2B	41.400.000	346.619.000	388.019.000
9	Kab. Malinau	KP	41.400.000	70.537.500	111.937.500
10	Kota Bontang	PKP2B	-	3.397.680	3.397.680
XX	<u>Nusa Tenggara Barat</u>		<u>212.583.566.250</u>	<u>2.799.300.100</u>	<u>215.382.866.350</u>
1	Kab. Sumbawa Barat	KK	212.583.566.250	1.527.174.000	214.110.740.250
2	Kab. Sumbawa	KK	-	1.072.764.000	1.072.764.000
3	Kab. Bima	KP, KK	-	34.089.700	34.089.700
4	Kab. Dompu	KP, KK	-	165.272.400	165.272.400
XXI	<u>Nusa Tenggara Timur</u>		<u>-</u>	<u>15.209.200</u>	<u>15.209.200</u>
1	Kab. Manggarai	KP	-	15.209.200	15.209.200
XXII	<u>Sulawesi Utara</u>		<u>5.751.279.824</u>	<u>2.010.298.354</u>	<u>7.761.578.178</u>
1	Kab. Bolaang Mongondow	KP, KK	5.751.279.824	1.805.951.825	7.557.231.649
2	Kab. Minahasa Selatan	KK	-	76.655.700	76.655.700
3	Kab. Minahasa Utara	KP, KK	-	51.347.969	51.347.969
4	Kab. Minahasa (Induk)	KK	-	69.782.378	69.782.378
5	Kota Bitung	KK	-	6.237.248	6.237.248
6	Kota Manado	KK	-	323.235	323.235
XXIII	<u>Gorontalo</u>		<u>-</u>	<u>100.389.445</u>	<u>100.389.445</u>
1	Kab. Gorontalo	KP, KK	-	19.667.320	19.667.320
2	Kab. Pohuwato	KK	-	19.762.875	19.762.875
3	Kab. Bone Bolango	KK	-	60.959.250	60.959.250
XXIV	<u>Sulawesi Tengah</u>		<u>-</u>	<u>581.259.605</u>	<u>581.259.605</u>
1	Kab. Morowali	KK	-	417.393.900	417.393.900
2	Kab. Parigi Moutong	KK	-	64.214.370	64.214.370
3	Kab. Donggala	KP, KK	-	36.802.365	36.802.365
4	Kab. Buol	KK	-	8.652.600	8.652.600
5	Kab. Toli-toli	KP, KK	-	54.196.370	54.196.370
XXV	<u>Sulawesi Selatan</u>		<u>125.194.978.723</u>	<u>1.336.121.530</u>	<u>126.531.100.253</u>
1	Kab. Luwu Timur	KK	125.194.978.723	1.122.174.900	126.317.153.623
2	Kab. Luwu	KK	-	80.936.955	80.936.955
3	Kab. Luwu Utara	KK	-	54.024.300	54.024.300
4	Kab. Sidenreng Rappang	KK	-	39.515.850	39.515.850
5	Kab. Takalar	KP	-	17.822.080	17.822.080
6	Kab. Enrekang	KK	-	9.901.980	9.901.980
7	Kab. Jeneponto	KP	-	8.970.000	8.970.000
8	Kab. Wajo	KK	-	2.775.465	2.775.465

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXVI	<u>Sulawesi Tenggara</u>		20.513.149.027	1.024.738.950	21.537.887.977
1	Kab. Kolaka	KP, KK	20.513.149.027	485.701.450	20.998.850.477
2	Kab. Konawe (Kendari)	KP, KK	-	289.642.100	289.642.100
3	Kab. Kolaka Utara	KK	-	134.352.900	134.352.900
4	Kab. Buton	KP, KK	-	62.426.000	62.426.000
5	Kab. Bombana	KK	-	33.125.400	33.125.400
6	Kab. Konawe Selatan	KP	-	19.491.100	19.491.100
XXVII	<u>Maluku</u>		-	391.560	391.560
1	Kab. Maluku Tenggara	KP	-	391.560	391.560
XXVIII	<u>Maluku Utara</u>		70.516.947.355	1.117.390.912	71.634.338.267
1	Kab. Halmahera Timur	KP	53.557.980.968	609.098.640	54.167.079.608
2	Kab. Halmahera Utara	KK	16.525.589.999	116.923.950	16.642.513.949
3	Kab. Halmahera Tengah	KP, KK	433.376.388	357.991.072	791.367.460
4	Kab. Halmahera Selatan	KP	-	33.377.250	33.377.250
XXIX	<u>Papua</u>		433.534.365.000	3.425.296.050	436.959.661.050
1	Kab. Mimika	KK	433.534.365.000	148.500.000	433.682.865.000
2	Kab. Paniai	KK	-	829.352.700	829.352.700
3	Kab. Sarmi	KK	-	718.022.250	718.022.250
4	Kab. Waropen	KK	-	325.779.300	325.779.300
5	Kab. Puncak Jaya	KK	-	231.535.260	231.535.260
6	Kab. Jayawijaya	KK	-	210.845.250	210.845.250
7	Kab. Keerom	KK	-	124.888.500	124.888.500
8	Kab. Tolikara	KK	-	87.512.040	87.512.040
9	Kab. Nabire	KK	-	708.097.500	708.097.500
10	Kab. Jayapura	KK	-	40.763.250	40.763.250
XXX	<u>Irian Jaya Barat</u>		-	348.069.150	348.069.150
1	Kab. Kaimana	KK	-	315.557.550	315.557.550
2	Kab. Raja Empat	KK	-	32.511.600	32.511.600
	Jumlah		2.935.853.900.325	57.315.765.785	2.993.169.666.110



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

LULUK SUMIARSO